



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
Email : info@konnasham.go.id Website : www.konnasham.go.id

KETERANGAN PERS
Nomor : 038/Humas-KH/X/2016
Tentang

“Langkah Penanganan Tindak Lanjut Laporan BPK atas Komnas HAM”

Terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Permintaan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa laporan tersebut menyatakan BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dimana BPK kemudian tidak memberikan penilaian (*disclaimer*).
2. Menyatakan terima kasih kepada masyarakat sipil, media massa dan seluruh masyarakat Indonesia atas kritik keras yang merupakan bentuk kepedulian terhadap Komnas HAM.
3. Memberikan jaminan bahwa Komnas HAM memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi dan menjaga kredibilitas, reputasi dan independensi Komnas HAM dengan melakukan langkah-langkah:
 - a) Sidang Paripurna Komnas HAM membentuk Dewan Kehormatan dan Tim Internal untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian.
 - b) Menonaktifkan Komisioner DB sesuai dengan laporan Dewan Kehormatan yang menyatakan:i). tindak penyalahgunaan biaya sewa rumah dinas oleh Komisioner DB telah melanggar Pasal 4 huruf e. dan Pasal 10 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 004B/PER. KOMNAS HAM/XI/2013 tentang Perubahan Kode Etik Anggota Komnas HAM; ii). tindak penyalahgunaan yang dilakukan oleh Komisioner DB merupakan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - c) Memeriksa seluruh pejabat Komnas HAM yang disebut dalam laporan BPK terkait temuan pengeluaran fiktif dan lebih lanjut melakukan penindakan atas hasil laporan bagi mereka yang terlibat/bertanggungjawab.

- d) Meminta bantuan KPK untuk mengembangkan sistem pencegahan dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan penyelidikan serta evaluasi menyeluruh atas kondisi Komnas HAM.

Demikian pandangan Komnas HAM untuk tetap menjaga kredibilitas dan independensi Komnas HAM agar dapat menjadi lembaga bagi pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Keterangan pers ini dibuat dalam rangka mendorong upaya bersama menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, 31 Oktober 2016

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Ketua,



M. Imdadun Rahmat

CP: Eva Nila Sari (Humas Komnas HAM - 081296166200)